



Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender: Suatu Studi Pendahuluan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau

Siti Arieta¹, Nikodemus Niko^{1*}, Syarifah Ema Rahmaniah², Rupita², Teguh Setiandika Igiasi¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Korespondensi: nikodemus15001@mail.unpad.ac.id

Info Artikel

Diterima 07 April
2022

Disetujui 20 Juli
2022

Dipublikasikan 01
Agustus 2022

Keywords:
Border Tourism;
Gender;
Pembangunan;
Pengarusutamaan.

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan pusat perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat. Upaya terencana ini bertujuan untuk mengubah wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, terutama dalam pemberdayaan perempuan perbatasan. Keterbatasan sumber daya maupun akses wilayah yang dihadapi perempuan menjadikan mereka rentan terhadap kemiskinan, eksploitasi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan eksplorasi data primer dan sekunder berbasis repositori daring. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka tidak terstruktur. Penelusuran daring terhadap data BPS dan menggunakan data kabupaten/kecamatan di perbatasan. Berdasarkan pembahasan, temuan studi awal penelitian ini yaitu belum adanya inisiatif pengarusutamaan gender (PUG) pada sektor pembangunan wisata perbatasan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Sehingga keterbatasan perempuan terhadap akses kepariwisataan ditandai dengan rendahnya partisipasi mereka dalam pembangunan. Artinya bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih perlu di evaluasi dalam pembangunan berkelanjutan daerah.

Abstract

The development of the border area is the center of attention of both local and central governments. This planned effort aims to transform areas inhabited by communities with various social, economic and physical problems, especially in the empowerment of border women. Limited resources and access to areas faced by women make them vulnerable to poverty, exploitation, and domestic violence. This research uses a descriptive qualitative approach with the exploration of primary and secondary data based on online repositories. Data collection was carried out with an unstructured literature study. Online search of BPS data and using district/sub-district data at the border. Based on the discussion, the findings of the initial study of this study are that there is no gender mainstreaming initiative (PUG) in the border tourism development sector in West Kalimantan and Riau Islands. So that women's limitations on access to tourism are characterized by their low participation in development. This

means that gender mainstreaming in development still needs to be evaluated in regional sustainable development.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia, sehingga menjadi wilayah yang strategis sekaligus rawan karena berbatasan langsung dengan banyak negara. Satu diantara wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu Kalimantan Barat. Terdapat lima kabupaten yang berbatasan darat dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian, wilayah Kepulauan Riau juga memiliki pulau-pulau yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura. Situasi ini menimbulkan berbagai tantangan, karena tidak hanya menyangkut keamanan manusia, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di wilayah batas.

Hingga saat ini pembangunan nasional belum tersebar secara merata hingga ke daerah pulau-pulau terpencil di wilayah perbatasan, termasuk di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau yang belum maksimal. Padahal wilayah perbatasan negara memiliki potensi ekonomis yang sangat kaya untuk dikembangkan. Apabila dioptimalkan dalam pembangunan berkelanjutan, wilayah perbatasan ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di seluruh tanah air. Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga berada di pundak masyarakat secara keseluruhan (lihat PJP Bappenas 2005-2025).

Menurut Raharjo (2013) Setidaknya ada tiga masalah umum yang muncul di kawasan perbatasan; *Pertama*, masih ada 9 titik demarkasi yang belum disepakati antara Indonesia dan Malaysia. *Kedua*, beberapa bagian kawasan perbatasan RI-Malaysia menjadi tempat terjadinya kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan orang dan sumber daya alam. *Ketiga*, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan relatif rendah. Serta ancaman keamanan yang meliputi *transnasional Crime, Illegal Fishing, Illegal Logging, Women and Child trades (trafficking), illegal imigran*, peredaran narkotika, pintu masuk terorisme, perdagangan senjata, serta konflik sosial dan politik (Tobing, 2002; Rani, 2012; Sulaksono, 2016; Kementerian Luar Negeri, 2019; Niko & Purnama, 2020; Makahingide, 2021).

Ancaman-ancaman tersebut sangat berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah, agar masyarakat yang tinggal di pulau perbatasan dapat merasa aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga potensi daerah atau lokal yang sangat kaya belum dapat diawasi dan dikembangkan sepenuhnya secara merata. Di pulau sebatik sendiri banyak sekali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan, seperti budidaya perikanan dan kelautan serta potensi pariwisata.

Dalam proses perencanaan sosial, pemerintah daerah dan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) sama-sama dituntut berperan aktif. Pentingnya peran serta masyarakat yang partisipatif mengandung makna bahwa adanya keterkaitan yang tidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis (Hamid, 2018). Dengan demikian, dalam konteks pemberdayaan dan partisipasi

warga masyarakat sangat erat keterkaitan antara pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah (Zubaedi, 2013).

Prinsip dasar pengembangan masyarakat (*community development*) telah muncul dalam berbagai diskusi akademik, mulai dari perspektif ekologi hingga pada pandangan pentingnya keadilan sosial sebagai dasar pengembangan seperangkat prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, yang digunakan dalam pendekatan pembangunan praktek kerja di suatu komunitas (Nasdian, 2015). Termasuk pemberdayaan perempuan seperti program kesetaraan dan keadilan gender yang bertujuan untuk pengembangan dan penguatan pengetahuan perempuan sebagai pusat pembelajaran terkait pengentasan kemiskinan melalui pemantauan program perlindungan sosial (Ariestiningsih, Genoveva & Has, 2021).

Secara implementasi, kesetaraan gender dalam pengembangan masyarakat bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Situasi seperti ini mencerminkan proses bagaimana pentingnya prinsip-prinsip pengembangan masyarakat perlu diterapkan secara efektif dalam konteks lokal atau pedesaan (Niko & Yulasteriyani, 2020). Nasdian (2015) menyebutkan bahwa konsep lokal mencakup wilayah teritorial, ikatan sosial, jejaring serta modal sosial dengan satu fokus interaksi.

Hasil penelitian Nurhaeni, dkk (2018) menyebutkan bahwa terjadi disparitas gender dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan pada kompetensi, dimana kompetensi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dimana disparitas gender tertinggi dalam keterlibatan perempuan pada tahap implementasi yang lebih rendah dibandingkan keterlibatan laki-laki. Sementara pengarusutamaan gender (PUG) menekankan pada mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan yang efektif dan adil bagi laki-laki dan perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam pembangunan sudah semestinya diperhitungkan. Artinya perempuan harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan itu sendiri. Keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk membawa dampak baik karena mereka akan memahami berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Paradigma seharusnya berubah dimana selama ini perempuan dipandang sebagai objek pembangunan semata (Sofiani, 2013).

Sebagai langkah awal untuk penentuan program pemberdayaan perempuan di wilayah pembangunan pariwisata perbatasan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, dalam penelitian ini kami mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana strategi awal dalam pengembangan pemberdayaan perempuan di wilayah pembangunan pariwisata perbatasan? Hal ini juga dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kerangka pembangunan dan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, sehingga *output* pemberdayaan perempuan yang dihasilkan akan menjadi optimal dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan eksplorasi data sekunder dan primer. Data primer didapatkan melalui asesmen data repositori online seperti google scholar, indonesia one search dan research gate. Tulisan ini menerapkan non-sistematik literatur review. Adapun data sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah, penelusuran data statistik (khusus wilayah perbatasan negara). Studi

pendahuluan ini tidak melibatkan stakeholder dan aktor, artinya tulisan ini hanya bertujuan untuk mengumpulkan data awal terkait dengan potensi sumber daya alam dan pariwisata perbatasan negara berdasarkan data literatur. Adapun wilayah studi yaitu perbatasan negara di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Potensi Pariwisata Perbatasan Negara: Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau

Kalimantan Barat menjadi satu dari delapan destinasi wisata perbatasan atau *cross border tourism* yang memiliki potensi pengembangan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Hal ini juga sama dengan wilayah Kepulauan Riau, dimana destinasi perbatasan yang cukup terkenal berada di Pulau Batam dan Pulau Bintan. Dalam perkembangannya, tantangan utama dalam kemajuan wisata khusus di Pulau Batan yaitu transportasi online yang masih berhadapan dengan regulasi lokal (Andini & Akbar, 2020). Kemudian, pulau lain juga tidak kalah menarik menjadi destinasi unggulan mancanegara, misalnya wilayah perbatasan Pulau Anambas yang strategis dan memiliki keindahan alam (Bedasari, Prayuda & Saputra, 2020).

Berbeda dari wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang pada dasarnya terdiri atas pulau-pulau, perbatasan Kalimantan Barat merupakan perbatasan darat yang menghubungkan antara Malaysia dengan Indonesia. Artinya porsi pembangunan antara kedua wilayah ini memiliki ke-khas-an masing-masing. Pada dasarnya strategi pembangunan wilayah perbatasan negara sudah banyak dikaji, seperti kajian Hendrayadi (2018; 2019) tentang strategi pembangunan perbatasan Kepulauan Riau, belum menemukan titik temu pada tahapan konsep *border tourism*.

Pembangunan sumber daya lokal di perbatasan negara selama ini masih sering dikesampingkan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karenanya sektor sumber daya lokal bukan menjadi sektor utama dalam suatu penetapan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi skala nasional. Hal ini karena wilayah perbatasan yang protokol kebijakannya langsung dari pusat, sehingga kebijakan daerah masih belum mengcover pembangunan perbatasan secara maksimal.

Adapun potensi sumber daya lokal berupa lahan/tanah yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat serta gugusan pulau-pulau yang ada di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Pada wilayah perbatasan darat, lahan diusahakan lebih besar sebagai lahan pertanian bukan sawah. Jenis usaha pertanian bukan sawah yang dimaksud adalah perkebunan karet, sawit, durian dan lada. Sebagian besar wilayah perbatasan darat di Kalimantan Barat adalah dataran tinggi dan perbukitan dengan lahan yang kering, sehingga tidak cocok dengan usaha pertanian sawah.

Keberadaannya yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia ini menjadi potensi bagi berbagai kejahatan transnasional. Namun, disamping itu pengelolaan perbatasan yang sudah berlangsung saat ini justru membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dimana potensi perbatasan menjadi tempat wisata. Potensi-potensi ini yang kemudian menjadi objek eksplorasi dalam rangka

mencari titik temu kebijakan dan pengembangan yang komprehensif (Setyadiharja, Yufenta, Hia & Novianti, 2016; Yudha & Dina, 2020).

Kemudian, potensi sumber daya lokal yang ada di wilayah perbatasan Kepulauan Riau seperti masih terjaganya kelestarian pulau-pulau yang menyuguhkan pemandangan dan pantai yang indah. Sumber daya yang terjaga ini apabila dikelola dengan baik, maka akan menjadi nilai tambah bagi destinasi wisata perbatasan. Misalnya di Kepulauan Riau, menurut Indra (2021) perlu adanya kebijakan desentralisasi asimetris dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk juga pengelolaannya sebagai wilayah wisata.

Secara umum, potensi sumber daya lokal yang ada di wilayah perbatasan negara saat ini masih belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini karena pengelolaannya yang masih belum maksimal. Pembangunan-pembangunan ekonomi daerah yang ada saat ini masih fokus pada sektor-sektor strategis skala besar yang berorientasi pada pertumbuhan PDB (*Produk Domestik Bruto*), sementara pada jenis usaha skala kecil, penduduk lokal kesulitan mendapatkan modal.

Pada sektor tenaga kerja dan pariwisata di perbatasan masih kurang tersentuh oleh pemerintah, padahal sebagian besar masyarakat di wilayah perbatasan negara yang merupakan buruh harian lepas di wilayah negara tetangga. Misalnya pada kasus di perbatasan Sanggau dan Bengkayang, di wilayah ini banyak penduduk lokal yang menjadi buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit di Serawak, Malaysia (Rahmaniah, 2015; Niko & Samkamarina, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi masalah untuk pembangunan dan pengembangan serta memfasilitasi masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata lokal perbatasan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah.

Pembangunan pariwisata perbatasan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan obyek maupun daya tarik wisata secara maksimal, obyek wisata tersebut misalnya PLBN Indonesia-Malaysia, pasar tradisional, kampung adat, dan wisata alam. Pemberdayaan perempuan menjadi penting, mengingat mereka yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan (*hospitality*) yang baik dan teliti. Pembangunan pariwisata ini menarik wisatawan dari Malaysia untuk datang dan membeli produk-produk lokal yang diolah oleh perempuan perbatasan. Sementara itu juga untuk menarik minat wisatawan lokal.

Para Sosiolog memiliki pandangan bahwa sejauh ini bidang pariwisata masih belum mampu mencapai kondisi keberlanjutan (*sustainable*) sehingga pariwisata masih menciptakan marginalisasi, eksploitasi alam demi kepentingan para kapitalis, akulturasi budaya, konflik antara masyarakat lokal dengan para wisatawan maupun pihak-pihak yang terlibat (Susilo & Dharmawan, 2021).

Situasi ini menandakan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan sudah semestinya mengutamakan pembangunan sumber daya manusia lokal, serta peran penting ilmuwan sosial dalam menelaah sebab-akibat sosial yang terdampak dari pengembangan pariwisata. secara sosiologis upaya pengembangan masyarakat perlu didekati dengan pengembangan berbasis lokal (daerah) yang menjalin ikatan sosial antara tingkat kelompok, komunitas, dan lokalitas (Nasdian, 2015).

Dalam konteks ini, SDGs berusaha untuk mengubah jalannya abad ke-21, mengatasi tantangan utama seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. SDGs bertujuan untuk membangun prestasi ini untuk memastikan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan harus diakhiri (UN Women, 2018). Pada kenyataannya di wilayah perbatasan negara masih ada ketidaksetaraan besar di pasar tenaga kerja dimana perempuan secara sistematis tidak memiliki akses yang sama dalam bidang pekerjaan, baik formal maupun informal.

Kemudian, kekerasan dan eksploitasi seksual, pembagian peran perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, dan diskriminasi di sektor publik acapkali dialami oleh perempuan. Pada kasus perbatasan, perempuan mengalami kemiskinan sistematis sehingga acapkali menjadi korban perdagangan manusia (Niko, 2016; Niko, 2017; Laurensiusarliman, 2018; Astuti, 2018). Semuanya tetap menjadi hambatan besar terhadap pencapaian pembangunan pariwisata perbatasan. Memberi perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, seperti akses terhadap tanah/lahan dan properti adalah target penting untuk mewujudkan tujuan ini.

3.2. Pembangunan Berkelanjutan dan Kaitan dengan Pengarusutamaan Gender

Menurut Rubin (1993) prinsip-prinsip dasar *Community Based Development* (CBD) sangat penting di *breakdown* ke dalam pemberdayaan perempuan, dimana pembangunan fisik dan pemberdayaan (pembangunan sumber daya manusia) berjalan beriringan. Konteks pemberdayaan perempuan ini dalam rangka merespon PUG yang menjadi prioritas dalam penyetaraan akses pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pemberdayaan perempuan sudah menjadi agenda internasional sejak Millenium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable Development Goals (SDGs) yang hingga hari ini masih berlangsung. Kesetaraan gender menjadi agenda penting dalam MDGs maupun SDGs hingga tahun 2030 (United Nation, 2010; UN Women, 2017). Artinya pembangunan sumber daya perempuan harus dilaksanakan hingga ke tingkat desa-desa terpencil.

Terdapat 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang terbentuk berdasarkan aspirasi global yang kohesif dan terintegrasi untuk dicapai pada tahun 2030 (Gambar 1). Adapun highlight yang ingin kami paparkan pada tulisan ini tentang tujuan ke-lima yaitu kesetaraan gender (*gender equality*), yang bertujuan 1) akhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun; 2) menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual dan jenis eksploitasi lainnya (UN Women, 2018).



Di Indonesia, kurangnya perhatian terhadap isu-isu gender dapat dilihat dari pengaturan kelembagaan, yang dari sudut pandang gender yang masih lemah. Hal ini juga terlihat pada hampir semua peraturan/kebijakan, isu-isu kesetaraan gender ini hanya dibahas secara singkat pada bagian pemberdayaan masyarakat (perempuan sebagai objek) dan peserta pertemuan desa (Syukri, 2021). Kemudian, temuan penelitian lainnya menyebutkan bahwa masalah utama pemberdayaan perempuan adalah terkait dengan akses bagi perempuan di lembaga dan organisasi masyarakat, yang memfasilitasi kegiatan sosial ekonomi perempuan, sehingga perempuan tidak dapat memperoleh dan memanfaatkan hak-hak mereka dalam meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial keluarga (Kushandajani, 2019).

Telah banyak bukti bahwa memberdayakan perempuan dan anak perempuan memiliki multi efek yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di berbagai level. Namun, pada masyarakat yang masih kental dengan sistem patriarki, pemberdayaan perempuan hampir mustahil dicapai. Kemudian, stigma terhadap ibu rumah tangga yang digambarkan hanya duduk manis di rumah, menonton TV sambil makan camilan, ngerumpi (Junaidi, 2017). Terlebih lagi, kedudukan perempuan dalam struktur sosial diperlemah karena anggapan pekerjaan mereka tidak produktif (menghasilkan/bernilai ekonomi) (Niko, 2020).

Pada studi awal yang berfokus pada strategi pemberdayaan perempuan di bidang domestik dan membawa perempuan ke dalam pembangunan ini, kami menarik benang merah bahwa pembangunan pariwisata perbatasan harus melibatkan perempuan secara aktif. Peran perempuan menjadi lebih berdaya akan mempunyai pengaruh besar dalam perubahan ekonomi rumah tangga.

Pembangunan jangka pendek dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Pembangunan dalam konteks pemberdayaan perempuan sebagai sebuah proses yang panjang dan berkesinambungan. Pemberdayaan tidak sekadar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri (Anwas, 2013).

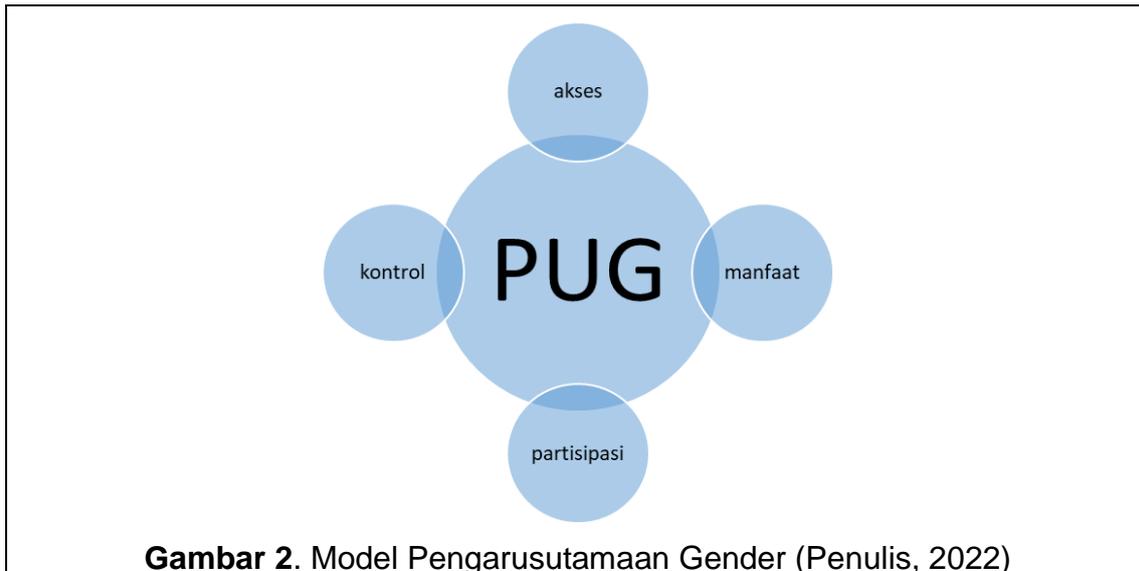
Strategi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pariwisata perbatasan ini perlu dipertimbangkan, mengingat wilayah perbatasan negara merupakan wilayah batas yang memiliki sumber kekayaan lokal. *Cross border tourism* yang selama ini sudah berlangsung, sedikit mengesampingkan peran dan keberdayaan perempuan sebagai aktor utama.

Pemberdayaan perempuan di perbatasan negara dapat dilakukan dengan mengacu pada pengembangan sumber daya lokal. Selama ini, sumber daya lokal yang cukup banyak belum dikelola secara maksimal, sehingga dalam proses pemanfaatan dan pengembangannya tidak terlalu banyak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap keberdayaan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu strategi yang menyeluruh untuk merubah pola produktivitas masyarakat di perbatasan, meskipun hal ini diperkirakan cukup sulit untuk mengubah ketergantungan sosial (*patron client*) masyarakat pada negara Malaysia yang lebih banyak mendukung aktivitas ekonomi penduduk.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yang sangat penting dilakukan ialah sebuah perencanaan sosial dimana aktivitas yang dilakukan tidak bersifat tunggal melainkan kolektif, yakni diperlukan kerjasama dan dukungan baik perumus program, pelaksana maupun penerima pelayanan dalam setiap program dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat sudah semestinya melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek (Suharto, 2007). Namun, di banyak tempat norma gender sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yakni budaya yang menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi dari perempuan (Siscawati, 2015). Sehingga penerima manfaat pemberdayaan tidak setara antara laki-laki dengan perempuan.

Pengarustamaan gender (PUG) pada dasarnya merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari aspek perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012). Adapun aspek yang menjadi strategi pemberdayaan dan memperkuat potensi sumber daya manusia perempuan yaitu kemitraan, pendidikan dan pelatihan.

Pemberdayaan tidak bisa terlahir begitu saja dalam masyarakat, namun pemberdayaan merupakan proses sinergisitas dimana diperlukan tangan dari luar untuk membantu proses tersebut dalam pengembangannya, sehingga dalam hal ini diperlukan mitra yang dapat mendukung proses tersebut, baik lembaga pemerintah, NGO, LSM ataupun lembaga-lembaga donor yang bersedia. Berikut ini inter-relasi antara pengarusutamaan gender dalam pembangunan (termasuk pembangunan pariwisata perbatasan).



Gambar 2. Model Pengarusutamaan Gender (Penulis, 2022)

Pengarusutamaan gender dalam menghadapi tantangan pembangunan masa kini harus diawali dengan adanya komitmen daerah untuk menurunkan kebijakan Perda/Pergub/Perbup/Perwali (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). Se jauh ini, wilayah kabupaten yang merupakan wilayah perbatasan negara, belum seluruhnya memiliki kerangka kerja kebijakan PUG. Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat, belum memiliki peraturan daerah khusus tentang rencana dan kerangka kerja pengarusutamaan gender. Namun pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan PUG sejauh ini sudah berjalan dilakukan pemerintah kabupaten sejak tahun 2019 (Bappeda Kab. Sambas, 2019). Sementara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, sudah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang PUG yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan Kabupaten Anambas. Artinya ada dan tidak adanya Perda turunan tentang PUG menjadi indikator komitmen pemerintah daerah terhadap rencana kerja PUG.

Berdasarkan penelitian eksisting, pengarusutamaan gender di setiap daerah yaitu mengutamakan program-program pemberdayaan perempuan yang implikasinya terhadap pembangunan sumber daya dan akses perempuan (Sutisna, 2012; Hermina, 2014; Rahayu, 2016; Wiasti, 2017; Ismail, Yulyana & Priyanti, 2020; Muhartono, 2021). Artinya bahwa dalam pemberdayaan perempuan harus diutamakan penguatan aspek akses, partisipasi, akses dan manfaat dalam pengarusutamaan gender. Sementara pada wilayah perbatasan negara di Sambas, Kalimantan Barat dan Anambas, Kepulauan Riau, masih tergolong tidak sama indeks pembangunan yang terlihat. Berdasarkan data eksisting, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Barat (86,81) lebih rendah dibandingkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kepulauan Riau (93,1) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Pembangunan sumber daya manusia perempuan di Indonesia tergolong lebih cepat, namun tertinggal (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Adapun strategi dalam percepatan kesetaraan akses yaitu masyarakat harus lebih terbuka menerima lembaga-lembaga mitra dalam pemberdayaan, begitu juga sebaliknya lembaga/mitra pemberdayaan juga

semestinya terbuka atas keterbatasan dan kondisi masyarakat lokal. Perlu adanya pendekatan holistik kepada masyarakat, terutama dari budaya lokal serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal. Pendekatan budaya dimaksudkan untuk mengenal masyarakat lokal lebih dekat. Sehingga masyarakat nantinya lebih mudah menerima dan mulai terbuka dengan program yang dilakukan maupun ditawarkan.

Dalam pemberdayaan tentu tidak luput dari pendidikan dan pelatihan, pendidikan baik berupa pendidikan karakter maupun pendidikan pengelolaan sumber daya ataupun transformasi pengetahuan (Sutisna, 2012; Hermina, 2014). Pada pemberdayaan perempuan di perbatasan negara lebih menekankan pada penguatan sumber daya manusia nya (termasuk karakter dan mental). Adanya pembentukan karakter dan mental ini maka perempuan tidak hanya menjadi *secondary* dalam pembangunan, perempuan yang nantinya tidak hanya manalahkan tangan dari tangan dalam proses pemberdayaan, tetapi mereka mampu menangkap peluang-peluang yang ada dari pembangunan pariwisata perbatasan. Aspek yang terakhir yakni pelatihan, apabila mental perempuan telah terbentuk dengan tangguh maka untuk bekal eksekusinya ialah pelatihan, penerapan pengetahuannya yang didapatkan dipraktikkan secara langsung.

Melalui proses pemberdayaan perempuan dalam mencapai pengarusutamaan gender bukan hanya sekadar tahapan-tahapan prosedural dari sebuah program, tetapi juga pembentukan diri bagi mereka hingga berdaya guna yang siap dan mampu bersaing dalam dan menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan perempuan di perbatasan dalam rangka menghadapi *cross border tourism* di perbatasan negara tidak hanya kemajuan bagi tujuan SDGs yang kelima, melainkan juga membawa keuntungan dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (tujuan SDGs pertama, mengakhiri kemiskinan).

4. Kesimpulan

Potensi pariwisata perbatasan yang menjadi unggulan sumber daya di wilayah perbatasan negara Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau membawa tantangan sekaligus peluang bagi keberdayaan perempuan di perbatasan. Potensi pariwisata perbatasan juga sangat strategis untuk dikembangkan dalam rangka mendukung kemajuan daerah, dengan sasaran wisatawan lokal maupun asing. Pemanfaatan potensi sumber daya lokal ini menjadikan pemberdayaan perempuan sangat penting menjadi aktor dalam pengelolaannya.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan pariwisata perbatasan tidak terlepas dari kebijakan daerah yang merupakan turunan kebijakan tentang PUG. Kertas kerja kebijakan (Perda) tentang PUG semestinya menjadi prioritas utama dalam merespon pembangunan berkelanjutan. *Cross border tourism* menjadi isu yang bersinggungan terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan pariwisata. Sehingga mutlak adanya pemberdayaan menjadi prioritas dipertimbangkan dalam membangun sumber daya manusia perempuan.

Daftar Pustaka

- Andini, C., & Akbar, D. (2020). Tantangan Pariwisata pada Wilayah Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Kasus Regulasi Transportasi Online di Kota Batam, Kepulauan Riau. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(2), 73-81.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Ariestiningsih, E. S., Genoveva., & Has, D. F. S. (2021). Creativepreneur on Sekoperproject: Women Empowerment Program for Economic Emancipation. *FIRM Journal of Management Studies*. 6(1):1-13. Doi: <http://dx.doi.org/10.33021/firm.v6i1.1309>
- Astuti, T. M. P. (2018, June). Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu: Kasus di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia. In *Forum Ilmu Sosial* (Vol. 45, No. 1, pp. 34-50).
- Bappeda Kab. Sambas. (2019). Sosialisasi Penguatan dan Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Sambas. Retrieved from: [https://bappeda.sambas.go.id/web/berita-baca-137-sosialisasi-penguatan-dan-peningkatan-pengarus-utamaan-genger-\(pug\)-di-kabupaten-sambas.html](https://bappeda.sambas.go.id/web/berita-baca-137-sosialisasi-penguatan-dan-peningkatan-pengarus-utamaan-genger-(pug)-di-kabupaten-sambas.html)
- Bedasari, H., Prayuda, R., & Saputra, A. D. (2020). Nilai Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Internasional Di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 150-162.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 6(1), 1-10.
- Hendrayady, A. (2019). Membangun Wilayah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 34-49.
- Herminda, D. (2014). Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 2(1):1-14.
- Indra, M. (2021). Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim dan Menjaga Kedaulatan Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 141-160.
- Ismail, K., Yulyana, E., & Priyanti. (2020). Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*. 6(4): 831-848. Doi: <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i4.4549>
- Junaedi, H. (2017). Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran. *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*. 12(01):77-88.
- Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Visi Dan Arah Pembangunan Jangka*

- Panjang (PJP) Tahun 2005–2025. Retrieved from: https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf
- Kementerian Luar Negeri. (2019). Kejahatan Lintas Negara. Retrieved from: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Cross Border Tourism: Membangun Pariwisata dari Perbatasan. Retrieved from: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Cross-Border-Tourism%2C-Membangun-Pariwisata-Dari-Perbatasan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). *Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Pengarusutamaan Gender: Semua dimulai dari Komitmen. Retrieved from: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1748/pengarusutamaa-n-gender-semua-dimulai-dari-komitmen>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Kushandajani. (2019). Social and Economic Empowerment for Village Women as a strategy of Village Development. *The Indonesian Journal of Planning and Development*. 4(1):1-6. Doi: <https://doi.org/10.14710/ijpd.4.1.1-6>
- Laurensiusarliman, S. (2018). Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 24-43.
- Makahingide, R. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Persoalan di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore dan Philipine Selatan. *Jurnal Politico*. 10(2):19-37.
- Muhartono, D. S. (2021). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal PUBLICIANA*. 13(2):117-134. Retrieved from <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/175>
- Nasdian, F. T. (2015). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Niko, N. (2016, October). Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. In *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.
- Niko, N. (2017). Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 32-37.
- Niko, N. (2020). Gender Struggle: What Can We Learn from the Dayak Benawan Women? *Walailak Journal of Social Science*. 13(2): 269-292. Retrieved from: <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wjss/article/view/234156>

- Niko, N., & Purnama, D. T. (2020). Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. 6(1):1-12. Doi: <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.1-12>
- Niko, N., & Samkamaria, S. (2019). Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 104-114.
- Niko, N., & Yulasteriyani. (2020). Pembangunan Masyarakat Miskin di Pedesaan: Perspektif Fungsionalisme Struktural. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*. 3(2):213-225. Doi: 10.37680/muharrrik.v3i02.476
- Nurhaeni, I. D. A., Sugiarti, R., Marwanti, S., & Pratiwi, R. D. (2018). Disparitas gender dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan (Gender Disparities in Ecologically Friendly-Tourism Development). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 10(1), 1-22.
- Raharjo, S. N. I. (2013). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif di Kecamatan Entikong). *Widyariset*. 16(1):73-80.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. 2(1):93-108.
- Rahmaniah, S. E. (2015). Peran Generasi Bina Bangsa (Genbi) Dalam Memberdayakan Masyarakat Perbatasan Jagoi Babang Kab Bengkayang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 183-208.
- Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*. 4(1):1-17.
- Rubin, J. H. (1993). Understanding The Ethos of Community Based Development: Ethnographic Description for Public Administrator. *Public Administration Review*. 53(5):428-437.
- Setyadiharja, R, Yufenta, W., Hia, M., & Novianti, A. (2016). Kebijakan Pembangunan dan Arah Potensi Sumber Daya Pada Wilayah Perbatasan Natuna Kepulauan Riau. *ARISTO*, 4(1), 53-64.
- Siscawati, M. (2015). *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program*. Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan.
- Sofiani, T. (2013). Membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 1(1).
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sulaksono, E. (2016). *Keamanan Lintas Perbatasan: Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor*. *Jurnal Keamanan Nasional*. 2(2):221-239.

- Susilo, R. K. D., & Dharmawan, A. S. (2021). Paradigma Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Lingkungan. *Jurnal Indonesia Maju*. 1(1):49-64. Retrieved from: <https://www.jurnalim.id/index.php/jp/article/view/12>
- Sutisna, A. (2012). Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Melalui Layanan Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD*. 7(2):153-159.
- Syukri, M. (2021). Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance. SMERU Working Paper. Retrieved from: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_neoliberal_developmental_gender_2019-9-6.pdf
- Tobing, F. B. L. (2002). Aktivitas Drug Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara. *Global: Jurnal Politik Internasional*. 5(1):75-86. Doi: <https://doi.org/10.7454/global.v5i1.320>
- UN Women. (2017). Women and Sustainable Development Goals. Retrieved from: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2322UN%20Women%20Analysis%20on%20Women%20and%20SDGs.pdf>
- UN Women. (2018). SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. Retrieved from: <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>
- United Nation. (2010). *Achieving Gender Equality, Women's Empowerment and Strengthening Development Cooperation*. Department of Economic and Social Affairs.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*. 1(1):29-42.
- Yudha, E. P., & Dina, R. A. (2020). Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi Kasus: Ranai-Natuna). *Tata Loka*, 22(3), 366-378.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana